

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR**

Nurul Hikma HS

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Email : nurulhikma1297@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to study the influence of internal control systems and human resources competence on the quality of the Makassar city government's financial statements. The variables of this research were internal control systems as a first independent variable, human resources competence as a second independent variable, and the quality of financial statements as a dependent variable. The population in this research was Makassar City Regional Government which carries out its activities in the field of accounting / financial administration. The sampling technique used a purposive sampling method. The sample on this research was the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) employees in Makassar city. The data were collected through questionnaires and documentation. The data analyzed using an instrument test, classic assumption test, and hypothesis test. The result of this research showed that the internal control systems and human resources competence simultaneously had a significant effect on the quality of financial statements with a significant value $< 0,05$. Internal control systems partially had a significant effect on the quality of financial statements with a significant value $< 0,05$ and human resources competency partially had a significant effect on the quality of the financial statements with a significant value $< 0,05$. The result of the coefficient of determination test (R^2) by 0,633 (63,3%). It means that the influence of internal control systems and the competence of human resources on the quality of financial statements was 63,3% while the remaining 36,7% influenced by other factors not examined, and the internal control systems have dominantly influenced the quality of financial statements.

Keywords: *Internal Control Systems, Human Resources Competence, Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yaitu laporan keuangan sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang

berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang akan berguna bagi pemerintah daerah guna menyusun dan mengevaluasi kebijakan dalam mengelola sumber dana. Laporan keuangan pemerintah daerah ini dinilai sangat penting karena merupakan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah daerah yang akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas.

Kualitas laporan keuangan adalah tingkat baik atau tidaknya suatu laporan atas

informasi yang termuat dalam laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan; andal; dapat dibandingkan; dan dapat dipahami. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dinilai oleh BPK untuk diberikan opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, Suwanda (2013:11). Agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas, maka harus dikelola dengan sistem pengendalian intern yang kuat dan sumber daya manusia yang berkompeten.

Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Komponen sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdiri atas 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan sistem pengendalian intern seperti yang diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 yang menyatakan kepala organisasi perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. BPK dalam menilai kewajaran laporan keuangan menggunakan sistem pengendalian intern sebagai salah satu kriteria. Dengan kata lain, sistem pengendalian intern merupakan salah satu tolok ukur laporan keuangan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2016:216) “kompetensi diindikasikan dengan kerja yang minimal baik sebagai hasil penggunaan kemampuan”. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam menentukan keberhasilan organisasi. Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi, oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut Suwanda (2013:138), “permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh faktor intern organisasi sendiri dan persoalan yang disebabkan oleh faktor ekstern organisasi”. Faktor intern organisasi meliputi kelemahan akuntabilitas keuangan, kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, kelemahan proses pengadaan barang dan jasa, dan kelemahan sumber daya manusia. Adapun faktor ekstern organisasi meliputi kelemahan regulasi, kelemahan kelembagaan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2018, di tahun 2017 LKPD yang memperoleh opini WTP sebesar 411 (76%). Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP hanya 18 (3%) (bpk.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, BPK masih banyak menemukan kelemahan-

kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kenyataannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak data-data yang tidak sesuai serta masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 ditingkat pemerintah daerah terdapat kelemahan SPI sebanyak 6.222 permasalahan. Adapun kelemahan SPI ini terdiri atas kelemahan atas akuntansi dan pelaporan, kelemahan atas pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di sub bagian akuntansi pemerintah masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai.

Berdasarkan pada beberapa penelitian mengenai sistem pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), Soimah (2014) Herawati (2014), membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), Soimah (2014), Sudiaranti (2014), membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh

Syarifuddin (2014) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi hasil penelitian dari masing-masing variabel yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan peneliti judul penelitian “Pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar” dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?; 2) Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?; 3) Variabel manakah yang pengaruhnya dominan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?.

KAJIAN TEORI

1. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif dari suatu laporan yang menyajikan informasi akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Adapun yang menjadi karakteristik kualitatif

laporan keuangan yaitu : 1) Relevan; 2) Andal; 3) Dapat dibandingkan; dan 4) Dapat dipahami.

2. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah kesatuan sistem yang dilakukan oleh pimpinan dan dirancang sedemikian rupa untuk melindungi asset negara untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi yang meliputi efektifitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun komponen lingkungan pengendalian terdiri atas: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam menentukan keberhasilan organisasi berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya. Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih..

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar yang melaksanakan kegiatannya pada bidang akuntansi/penatausahaan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel di dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang akan digunakan uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil nilai signifikan $< 0,05$, berarti bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar, maka dengan ini hipotesis “diterima”. Artinya sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga apabila sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat menjadi lebih baik.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa nilai signifikan $< 0,05$, berarti sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah kota Makassar, maka dengan ini hipotesis “diterima”. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat, atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian wewenang dan tanggung jawab pegawai telah dilakukan secara tepat, pengelolaan atas risiko telah dilakukan, seluruh transaksi telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, penyajian informasi telah dilakukan secara tepat waktu, dan tindak lanjut atas temuan telah dilakukan dengan baik akan berimplikasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007:11) “kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014), Sudirianti (2015) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa nilai signifikan $< 0,05$, berarti kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar, maka dengan ini hipotesis “diterima”. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat, atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki kemampuan dibidangnya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga akan berimplikasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Wahyono (2004:12)

“kemampuan sumber daya itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatanwaktu)”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soimah (2014), Sukmaningrum yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Variabel yang Dominan Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai koefisien determinasi untuk sistem pengendalian intern sebesar 0,546 dan nilai koefisien determinasi untuk kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,496. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern memberi pengaruh lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern lebih dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitas laporan keuangan sebesar 85,63 persen berada dalam kategori sangat baik, sistem pengendalian intern sebesar 81,82 persen berada pada kategori baik, kompetensi sumber daya manusia sebesar 83,80 persen berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi $Y = 9,317 + 0,363 X_1 + 0,319 X_2$. Sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar $< 0,05$, serta sistem pengendalian intern memiliki pengaruh lebih

besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar, diharapkan: 1) Meningkatkan lingkungan pengendalian dengan penerapan aturan mengenai perilaku etika pegawai. 2) Meningkatkan pengetahuan pegawai dengan memberikan pelatihan mengenai teknik pekerjaan dan juga meninjau lebih

lanjut terkait penyajian laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti sistem akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

REFERENSI

- Alimbudiono, R. S & Fidelis, A. A. (2004). Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol 05 No.02
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR-Study & Accounting Research*, XI.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. www.bpk.go.id
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi dan Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Soimah, S. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. (Skripsi), Universitas Bengkulu,
- Sudiarianti, N. M. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Tesis), Universitas Udayana,
- Sukmaningrum, T. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. (Skripsi), Universitas Diponegoro,
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP: Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM
- Syarifuddin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen) *Jurnal Fokus Bisnis Vol 14*
- Wahyono, T. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi : Analisis, Desain, dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara